



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Perselisihan	IHK368	2	VI	31 Januari 2022
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Budy Bhudiman, SH., MH., Sp.N		 Dr. Ibrahim Fajri, SH., M.E.I	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.		
	S-3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		
	P-2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang		
	P-5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum		
	KU-3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data		
	KK-1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum		
	CP Mata Kuliah			
1	Mahasiswa mengetahui dan mampu memahami tata cara dan prosedur penyelesaian hukum perselisihan			

Khusus	2	Mahasiswa mengetahui dan mampu memahami tatacara dan prosedur penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang efektif serta mampu menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai hukum.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Hukum perselisihan adalah semua kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Pengertian Hukum Perselisihan 2. Jenis-Jenis Hukum Perselisihan	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % : 25 % Penugasan : 20 % : 40 %	UTS : UAS :
Pustaka	1. Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang No. 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Undang-Undang Nomor 21 / 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; 4. Bahan-bahan bacaan lainnya dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel, contoh kasus, dsb	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak Power Point	Perangkat Keras Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching	-	
Mata Kuliah Syarat	-	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub – CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lex specialis) dan perbedaan dengan Hukum Acara Perdata (lex generalis)	Pengantar : Kontrak Pembelajaran, Maksud dan Tujuan Mempelajari Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial & PHK. Prosedur Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	1. Makalah dan 2. presentasi	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Acara Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lex specialis) dan perbedaan dengan Hukum Acara Perdata (lex generalis)	Ketetapan dalam melakukan presentasi dalam pemahaman hukum penyelesaian.	5%
2	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemahaman mengenai cara melakukan perundingan bipartit, dan membuat Risalah Perundingan Bipartit	Jenis perselisihan hubungan industrial di Indonesia, cara melakukan perundingan bipartit, membuat Risalah Perundingan Bipartit	1. Makalah dan 2. presentasi	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai cara melakukan perundingan bipartit, membuat Risalah Perundingan Bipartit	Ketepatan dan kesesuaian menjelaskan presentasi	5%
3	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit sampai tahap Mediasi	Kompetensi lembaga Mediasi, Peranan Mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Produk Mediasi, Sifat Anjuran	1. Penyampaian materi dan 2. Diskusi kelompok	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia pada tahap Mediasi, produk Mediasi, dan Sifat Anjuran	Ketepatan uraian kompetensi lembaga mediasi	5%

4	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari perundingan bipartit hingga tahap Konsiliasi, produk Konsiliasi dan sifat Anjuran	Kompetensi lembaga Konsiliasi, Peranan Konsiliator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Produk Konsiliator, Sifat Anjuran Konsiliator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi dan 2. diskusi kelompok 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia pada tahap Konsiliasi, produk Konsiliasi, dan Sifat Anjuran	Ketetapan dalam memahami penyelesaian perselisihan hubungan industrial	5%
5	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Arbitrase Hubungan Industrial, produk dan sifat Putusan Arbitrase Hubungan Industrial	Kompetensi lembaga Arbitrase Hubungan Industrial, Peranan Arbiter, Syarat dan Perjanjian Arbitrase, Produk dan Sifat Putusan Arbitrase HI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi dan 2. diskusi kelompok 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Arbitrase, produk Arbitrase, Sifat Putusan Arbitrase HI.	ketetapan dalam menjelaskan dan memahami lembaga arbitrase	10%
6	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di	Kompetensi Pengadilan HI, Prosedur Gugatan, Produk dan Sifat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dikaitkan dengan jenis perselisihan hubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi dan 2. diskusi kelompok 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari	Ketepatan uraian pengadilan HI	10%

	Pengadilan Hubungan Industrial dari proses Gugatan sampai Kasasi ke MA dan sifat Putusan PHI	industrial		perundingan sampai mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dan kasasi di MA, dan Sifat Putusan PHI		
7	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial	Prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan dari perundingan bipartit sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi dan 2. diskusi 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP dalam 1 perusahaan di Pengadilan Hubungan Industrial	Ketetapan memahami penyelesaian perselisihan	10%
8	UTS					
9	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan Hak dari perundingan bipartit hingga	Prosedur penyelesaian perselisihan hak dari perundingan bipartit sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi dan 2. Tanya jawab 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan Hak dari perundingan bipartit Pengadilan Hubungan Industrial	Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat	10%

	Pengadilan Hubungan Industrial					
10	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan PHK dari perundingan bipartit hingga Pengadilan Hubungan Industrial	Prosedur penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perundingan bipartit sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi kelompok 2. Tanya jawab 3. penyampaian (review materi) 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian perselisihan PHK dari perundingan bipartit sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial	Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat	5%
11	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan alasan PHK yang dilarang oleh peraturan perundangan	Syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Larangan PHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi kelompok 2. Tanya jawab penyampaian 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), alasan alasan PHK yang dilarang oleh peraturan perundangan	Ketepatan memahami mengenai PHK	5%

12	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (syah) oleh pengusaha prosedur lock out, prosedur mogok kerja yang syah, akibat hukum mogok kerja yang tidak syah.	Alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (syah) oleh pengusaha, prosedur lock out, prosedur mogok kerja yang syah, akibat hukum mogok kerja yang tidak syah.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Diskusi kelompok 4. Tanya jawab penyampaian 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Alasan-alasan PHK yang dapat digunakan (secara syah) oleh pengusaha, prosedur lock out, prosedur mogok kerja yang syah, akibat hukum mogok kerja yang tidak syah.	Ketepatan memahami mengenai PHK	5%
13	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK karena alasan perusahaan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang melakukan PHK karena perusahaan rugi 2 tahun berturut-turut, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi kelompok 2. Tanya jawab penyampaian 	Menguraikan pengertian dan pemahaman mengenai Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang melakukan PHK karena perusahaan rugi 2 tahun berturut-turut, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang	Ketepatan memahami 2 tahun PHK	10%

14	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK yang dilakukan pengusaha karena alasan perusahaan melakukan efisiensi	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang melakukan PHK karena alasan efisiensi, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi kelompok 2. Tanya jawab penyampaian 	Menjelaskan tentang Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang hendak melakukan PHK karena alasan efisiensi, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	Ketetapan dalam bertanya dan pendapat mengemukakan	5%
15	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai PHK yang dilakukan pengusaha karena perubahan status perusahaan (merger, akuisisi dan konsolidasi), Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang melakukan PHK karena alasan merger, akuisisi atau konsolidasi, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi kelompok 2. Tanya jawab penyampaian 	Menjelaskan tentang Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang hendak melakukan PHK karena alasan merger, akuisisi atau konsolidasi, Hak Pekerja yang di PHK & cara menghitung paket uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.	Ketetapan mengumpulkan tugas tepat waktu	5%

